MANAJEMEN STRATEGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KEAGAMAAN MUSLIM DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan

Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Isro Siregar

NIM. 0104173149

Program Studi: Manajemen Dakwah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

MANAJEMEN STRATEGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KEAGAMAAN MUSLIM DI KABUPATEN

TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan

Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Sosial (S, Sos)

Oleh

Isro Siregar

Nim. 0104173149

Program Studi: Manajemen Dakwah

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Asmuni M.Ag	Dra. Hj. Mutiawati, MA
NIP:195408201982031002	NIP:196911081994032003

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Nomor : Istimewa

Lamp : 7 (Tujuh) Exp

Hal : Skrpsi

An. Isro Siregar

Medan, 21 Juni 2021

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UINSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Isro Siregar yang berjudul "Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim Di Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Saejana Sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Asmuni M. Ag
NIP:1954082031001

PembimbingII

Dra. Hj. Mutiawati, MA
NIP:196911081994032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isro Siregar

NIM : 0104173149

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh institute batal saya terima.

Medan, 1 June 2021

Yang Membuat Pernyataan

Isro Siregar
Nim: 0104173149

ABSTRAK

Nama : Isro Siregar

Nim : 0104173149

Jurusan : Manajem Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Tempat, Tanggal Lahir : Barnang Koling, 17 September 1999

Judul Skripsi : Manajemen Staregi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim Di Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui hal-hal berikut: (1) Peranan DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam. (2) Upaya DPRD untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan. (3) Untuk mengetahui kendala dan solusi DPRD dalam meningkatkan pemahan sosial keagamaan terdap muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini dilakkan untuk menemukan bahwa (DPRD) sangat berperan penting dalam meningkatkan serta memajukan masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bidang sosial keagaamaan, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Dengan tujuan merubah pola pikir masyarakat, menerapkan nilai-nilai islam, memberikan contoh teladan terrhadap generasi muda, sehingga tercipta masyarakat yang islami yang berakhlak sesuai dengan pedoman Al-qur’an dan Al-Hadist.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan karunia-Nya pada penulis, untuk bisa berjuang susah payah dalam penyusunan skrpsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN sumatera utara.

Penulis menyadari bahwa masih minimnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, sehingga banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat kesabaran, ketekunan serta keikhlasan dan bimbingan dari bapak/ibu dosen pembimbing dan bantuan dari berbagai pihak sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada.

1.Bapak Prof. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

2. Bapak Prof Dr Lahmuddin Lubis. Med, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan kesempatan untuk menjalankan perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

3. Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA selaku Ketua Jurusan Manaemen Dakwah, Bapak Dr. Soiman, Ma. Selaku pembimbing Akademik saya, dan Kakak Kairani M.Si sebagai staf jurusan yang banyak membantu dan memudahkan segala urusan selama pengerjaan skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Asmuni M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibuk Dra. Hj Mutiawati MA. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan dan pelajaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pihak Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak Muhammad Faisal Siregar, ST, Bapak Arwan Siregar S.Sos dan ibuk Erlina Hasibuan yang telah banyak membantu memberikan informasi dan kelengkapan data-data untuk menyelesaikan skripsi saya ini.

6. Terimakasih banyak untuk diri sendiri sejauh ini sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan skripsi ini, meski banyak problem dan berbagai masalah yang dilalui dari berbagai fase kehidupan, tapi tetap bertahan demi mewujudkan impian orang tua tercinta sebagai sarjana pertama dikeluarga.

7. Keluarga Tercinta, Bapak Borkat siregar dan Ibu Irma Harahap selaku kedua orang tua, yang paling berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan bimbingan kasih sayang dan selalu mendukung segala hal yang saya inginkan. Keduanya tidak pernah mengeluh sedikitpun untuk membanting tulang mencari nafkah demi penulis bisa mencapai cita-cita. Kemudian kepada Adek Ibnu Asri Siregar , Maslian Siregar, dan Junjung Siregar, penulis ucapkan terimakasih banyak sudah membantu mengantarkan pagi, siang ke bukit untuk mencari jaringan demi bisa bimbingan dan segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat paling menginspirasi dan memberi solusi sekaligus tim support baik di bangku kuliah dan diluar perkuliahan, yaitu, Sakinah Rahma, Kakak Rifka Khoria Pane, Bang Edrizal, Sapri Romadhon dan tak lupa juga Dahlia, Wirda, dan juga Mahfiza Syafrida, Mitha Sukma Nasution, Dewi Andriani, Rida Nurmalia, Ainun Khoiriah , Telah ada disaat saya membutuhkan selalu menjadi penolong dan memberikan solusi, disaat saya bingung mencari tempat Sempro dan Sidang.

9. Rekan-rekan senasib dan seperjuangan prodi Manajemen Dakwah-A stambuk 2017 yang sudah menjadi bagian dari pengalaman dan relasi semasa di bangku kuliah

10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pebriadi Simamora dari Unipersitas Malikussaleh yang bertempat tinggal di Desa Pangaribuan Kec. Sipirok yang sudah menjadi support system bagi penulis dikala bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi ini, meskipun secara virtual.

11. Kepada bang Abdi Putra Wicaksonodan Ka Sri Wahyuni Turnip, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah membantu memberikan informasi, mengajari berbagai tugas dan masih banyak lagi.

12. kepada teman-teman, kerabat, yang tidak bisa saya sebutkan lagi, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa dan supportnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan mendapatkan gelar S. Sos.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT Penulis berserah diri, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca padaumumnya.

Medan 1 Juni 2021

Penulis

Isro Siregar

Nim. 0104173149

DAFTAR ISI

Abstrak i
Kata Pengantar ii

Daftar Isi.....

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Batasan Istilah 9
D. Tujuan Penelitian 13
E. Kegunaan Penelitian 13
F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : LANDASAN TEORITIS 15

A. Manajemen Strategi 15

1. Pengertian Manajemen Strategi 15

2. Proses Manajemen Strategi 16

3. Manfaat dan Tujuan Manajemen Strategi 20

B. Pengawasan DPRD Tapanuli Selatan 20

1. Pengertian DPRD 21

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22

3. Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah 23

C. Pembangunan Sosial Keagamaan 24

1. Pengertian Pembangunan Sosial 24

2. Perencanaa Dalam Prespektif pembangunan 25

D. Bimbingan Kehidupan Sosial Beragama 27

E. Penelitian Terdahulu 28

BAB III : METODE PENELITIAN 31

A. Jenis Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 33
C. Informan Penelitian 33
D. Sumber Data 34
E. Instrumen Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 36

BAB IV : HASIL PENELITIAN 38

A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 38
B. Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 41
C. Pelaksanaan Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan 45
D. Pengaruh Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan 49
E. Hambatan yang Dihadapi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan 55
F. Solusi yang Dilakukan DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan 56

BAB V : PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

Daftar Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai peran serta tugas penting untuk mewujudkan suatu tujuan Lembaga/Organisasi yang dimilikinya. Walaupun demikian baik dan sempurna, *planning* dan *controlling* dalam suatu lembaga/organisasi, namun terkadang sulit juga untuk mencapai pada tingkat keberhasilan atau optimisnya. Karena suatu hasil kinerja dari pegawai atau anggota tergantung pada kemauan untuk mencapai hasil dan tujuan bersama dengan efektif dan efisien. Peranan manajer dalam suatu lembaga sangatlah penting untuk memotivasi dan mengarahkan anggotanya kepada tujuan yang ingin dicapai bersama.

Sama halnya dalam suatu instansi/lembaga baik dalam tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga pedesaan. Dari beberapa tingkatan ini mempunyai kesamaan dalam mencapai tujuan serta keberhasilan bersama. Pada lembaga tersebut dapat tercapai apabila masing-masing komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal. Maka di dalam suatu lembaga yang baik, terdapat pula manajemen strategi yang diterapkan di dalamnya.[1]

[1]Amirullah, *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses pengendalian* , (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2013), hlm 165

Maksud dari manajemen strategi itu sendiri ialah “seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasiaan keputusan yang diambil oleh seorang manajer. Manajemen strategi sangat berpengaruh terhadap fokus pada penetapan tujuan lembaga, pengembangan, perencanaan dan kebijakan dalam mencapai target atau sasaran serta dapat mengalokasikan sumber daya supaya dapat menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan lembaga. Manajemen strategi juga mengatur, mengarahkan serta mengelola suatu organisasi maupun lembaga dengan cara melakukan *planning* terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan. [2]

Sama halnya dalam kasus manajemen strategi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan priode 2019/2024, sangatlah penting karena keberadaan DPRD sebagai perwakilan rakyat, menjadi faktor yang mempengaruhi ujung tombak keberhasilan dari suatu lembaga pemerintahan. Salah satu fungsi/peran DPRD yaitu dapat mengelola dan memecahkan konflik, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan agama yang terjadi di daerah kepemimpinannya.

Dengan strategi dan metode kepemimpinannya yang sesuai, dengan situasi dan kondisi, maka bawahannya akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dengan harapan tercapainya tujuan dari pada lembaga atau organisasi itu sendiri. Dalam pengawasan Pembangunan di bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan, hal yang dapat dilakukan

[2] Wahyuddin Nur Nasution, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta :Perdana Publishing, 2019), hlm 10

DPRD yaitu, ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkat kualitas pembanguanan di Tapanuli Selatan.

Dalam mengikuti secara langsung kegiatan sosial keagamaan seperti perayaan hari besar islam (PHBI) dan mengadakan berbagai program, sebagai bentuk dukungan dalam pengawasan pembangunan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Namun terdapat beberapa perbedaan atau kesenjangan yang terjadi dalam pengawasan pembanguan sosial keagamaan muslim di kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu kurang pada wilayah pedesaan yang dekat dengan perkantoran DPRD dengan desa yang jauh dan sulit diakses oleh transportasi antara lain:

a. Desa Tolang, merupakan desa yang letaknya strategis berdekatan dengan kantor DPRD Tapanuli Selatan, sehingga mudah di jangkau dan dikunjungi secara langsung pemerintahan DPRD Tapanuli Selatan. masyarakatnya lebih berkembang baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, social keagamaannya disebabkan mudah mendapatkan akses informasi dan bisa dijangkau transportasi kapan saja.
b. Desa Barnang Koling, dibandingkan dengan Desa Tolang, desa ini jarang dijangkau oleh lembaga DPRD Tapanuli Selatan karena lokasi yang sangat jauh dari Perkantoran bahkan kedua desa ini merupakan desa tertinggal dimana penduduknya sulit mengakses informasi dan sulit dijangkau oleh transportasi karna jalan yang rusak parah sehingga menyulitkan pemerinta DPRD menyalurkan bantuan dan mengikuti kegiatan social keagamaan di Desa Tersebut.

Dari kasus ini terdapat kesenjangan penerimaan bantuan, baik itu material ataupun jenis bantuan lainnya. Antara desa yang mudah diakses dan desa yang sulit untuk dikunjungi. Adapun dana yang dikeluarkan oleh DPRD bukan merupakan dana khusus maupun wajib dari lembaga melainkan bentuk partisipasi dari DPRD Tapanuli Selatan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan. Padahal sebagai DPRD yang bertugas mewakilkan suara rakyat, bertugas untuk mengusulkan kepada pemerintah agar mengeluarkan dana khusus setiap tahunnya guna meningkatkan kegiatan sosial keagamaan, baik dikalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.

Dengan diwajibkannya dana untuk kegiatan sosial keagamaan, maka akan berdampak positif terhadap pemerintah setempat, akan terciptanya generasi yang paham akan agama dan selalu mematuhi peraturan yang ada, dan juga melahirkan generasi yang berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, serta taat kepada agama dan negaranya. Dengan demikian calon pemimpin dan pejabat Negara yang akan datang akan terhindar dari sifat rakus terhadap jabatan dan uang dan meninggalkan sifat Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam hal ini pemerintah DPRD dan masyarakat Tapanuli Selatan harus bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat Tapanuli Selatan juga harus ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi. Dengan adanya kerja sama antara

pihak lembaga DPRD dengan Masyarakat maka akan menghasilkan suatu pengawasan pembangunan, lebih lagi kedua pihak saling memahami bahwa setiap yang dilakukan, dan yang dikerjakan akan mendapat pertanggung jawaban baik di dunia maupun diakhirat. Oleh Karen itu Allah selalu senantiasa mengawasi segala tindakan yang dilakukan hambanya dimana dan kapan saja. Seperti dijelaskan dalam (Q.s Al-mujadilah ayat 7).

لَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْاۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: Tidaklah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempanya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s Al-mujadilah ayat 7).[3]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi dan Maha mengetahui segala apapun yang dikerjakan. Maka dari itu menghindari sifat kecurangan dan ketidak adilan seorang anggota legislatif atau anggota pemerintah bisa memahami ayat-ayat Allah untuk jadi pedoman dan landasan untuk memperbaiki diri dan bisa mengajak masyarakat kepada kebenaran.

Dalam pelaksanaan menunjang tugas serta fungsi dari suatu organisasi/lembaga yang dipimpin khususnya pada DPRD Tapanuli Selatan,

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 543

untuk pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi atau lembaga yang bersangkutan haruslah berhubungan secara langsung dengan orang-orang yang berada di dalam instansi/lembaga tersebut, maupun orang-orang yang berada di luar lembaga yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan dari lembaga legislativ yang dimaksud disini ialah pelaksanaan pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh DPRD terhadap masyarakat yang berada di Tapanuli Selatan.

Allah SWT menjelaskan bagaiman sikap sosial antara pemimpin dengan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya serta cara memperlakukan orang dengan baik sesuai yang dijelaskan dalam (Q.s Ali Imran ayat 159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.l*[4] (Qs. Al-Imran ayat 159

Manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim di kabupaten Tapanuli Selatan, dapat memberikan respon yang cukup baik serta dapat menjalankan peraturan per Undang-Undang Pemerintahan daerah yang sudah melakukan langkah-langkah yang benar, dan bersifat strategis maupun yang bersifat teknis. Langkah-langkah tersebut dibuat

[4] *Ibid* hlm. 71

sebagai bentuk kebijakan, pada peraturan daerah (perda), dan juga kebijakan-kebijakan khusus, maupun aturan teknis yang mengatur dan mengarahkan program pengawasan pembangunan daerah pada pelaksanaan untuk mencapai tujuan.

Permasalahan yang cukup menarik untuk diketahui dan dikaji dalam hal ini ialah, apakah aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki komitmen, support maupun semangat yang cukup tinggi guna pemberdayaan masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif serta menciptakan rasa demokratisasi yang sesuai dengan perundang-undangan (Otonomi Daerah). Telah diuraikan pada bagian atas, dengan hal ini sangat penting diadakannya evalusi serta analisis yang mendalam dari produk atau planning, kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.[5]

Kebijakan dan peraturan yang akan dijadikan sebagai bahan dalam kajian ini yaitu kebijakan dan ketentuan pengawasan pembangungan yang di buat oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan untu memberdayakan masyarakatnya dalam bidang sosial keagamaan, menumbuh kembangkan pemahaman, penerapan, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan. Menjadikan alasan dasar untuk mengkaji bidang sosial-keagamaan adalah:

a. Bidang ini berupa bidang yang sangat Urgen untuk pedoman pengetahuan agama bagi masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan.

[5]Perda Tapsel no 7 thn 2016

b. Bidang ini juga merupakan bidang yang dapat menciptakan demokratisasi serta rasa Nasionalime bagi masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan. Peran masyarakat juga begitu kuat dalam proses pembangunan daerah.
c. Bidang ini menjadi pendukung sekaligus pedoman untuk mempengaruhi bidang-bidang yang lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini, maka penulis melanjutkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **" Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim Di Kabupaten Tapanuli Selatan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu untuk mempermudah mengetahui masalah penting yang akan dihadapi dan diteliti, maka rumusan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan?

2. Bagaimana pengaruh manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan terhadap pengamalam agama masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan?

3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi DPRD dalam pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Batasan Istilah

1. Manajemen Strategi

Berbagai para ahli ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategi dengan cara yang berbeda antara lain:

a. Menurut Certo, manajemen strategi adalah analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
b. Menurut Wheelen sendiri mendefenisikan manajemen strategi adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisis S.W.O.T. [6]
c. Sedangkan pengertian Manajemen Strategi DPRD adalah proses pendekatan berupa rencana prangkat manajerial penting terhadap setiap organisasi daerah (pemerintahan daerah, untuk merepresentasikan komitmen guna membangun visi misi dan membuat perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[7]

Adapun pengertian Manajemen Strategi DPRD dalam skripsi ini menurut saya adalah cara mengatur, mengelola dan mengarahkan suatu organisa/lembaga

[6] Efri Novianto, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019), hlm 12
[7] Dewi Asriani dkk,Jurnal *Manajamen Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Konawa* Tahun 2015-2017 hlm 3

DPRD kepada keputusan dan ketetapan yang dibuat guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien dan pada penilitian ini fokus kepada manajemen strategi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan Pengawasan DPRD yaitu "pengawasan badan legislatif atau tindakan lembaga eksekutif ini berwujud pertama-tama menanyakan sesuatu tentang tindakan tertentu dari pemerintah, tergantung dari jawaban pemerintah dapat disetujui oleh badan legislatif atau tidak. Untuk melakukan pengawasan ini, juga sering perlu parlemen mengadakan penyelidikan soal-soal khusus yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, parlemen dapat mengirimkan beberapa anggota untuk meninjau ke daerah-daerah atau Departemen –departemen pemerintahan. Dengan hasil penyelidikan ini dapat dinilai tindakan-tindakan pemerintah tentang soal-soal tertentu.[8]

Menurut saya yang dimaksud dengan pengawasan dalam DPRD adalah pemantauan yang dilakukan guna mengetahui tugas serta fungsi dari DPRD itu sendiri dan memastikan program serta kegiatan yang sudah di rencanakan (*planning*) bisa dijalankan atau tidak. Dalam pembahasan mengenai pengawasan DPRD saya sebagai penulis hanya mengkaji kinerja dari DPRD di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Priode 2019/2024 di Kabupaten Tapanuli Selatan Khusunya di Kecamatan Sipirok.

[8] Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Surabaya:Airlangga University Press 2020) , hlm 180

3. Pembangunan Sosial

Menurut Rahman pembangunan sosial adalah suatu proses yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat, satu keadaan dimana segala keperluan sosial dipenuhi, peluang-peluang diwujudkan, dan masalah sosial ditangani dengan baik.

Safi'I mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah sebuah bentuk normatif yang menjadi isyarat dan pilihan pada tujuan guna mencapai seperti apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan sangat berbeda artinya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dengan itu, safi'I mengutip Todaro dalam bukunya "*Economic Depolepmen In The Third World*" mengatakan bahwa "pembangunan adalah proses *multidimensional* yang menyangkut reorganisasi dan reorenntasi sistem sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Di samping untuk meningaktkan suatu pendapatan yang *out put* pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagan, struktur sosial.[9]

Dalam skripsi ini kata pembangunan saya gunakan dalam bentuk non pisik yang dilakukan oleh DPRD terdap masyarakat di Tapanuli selatan seperti mengadakan kegiatan sosial keagamaan di dalam (PHBI) dan kegiatan keagamaan lainnya guna membangun nilai-nilai sosial agama islam di Tapanuli Selatan.

4. Sosial Keagamaan

[9] Amira Dzatin Nabila, *Konstruksi Participatory Berbasis Budaya Kalosara Sebuah Perspektif Sosiologi Pembangunan*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 3

a. Menurut G.W Alport sosial keagamaan ialah kecenderungan yang relativ stabil dan berlangsung secara terus menerus sebagai karakteristik atau tingkah laku sebagai bentuk reaksi, dengan melakukan cara-cara tertentu terhadap perilaku lain, objek lembaga atau persoalan tertentu.
b. Sedangkan menurut Saebani berpendapat sosial kegamaan adalah menjalankan kehidupan dengan perilaku sosial yang baik, dengan dasar-dasar kejiwaan yang mulai dan bersumber pada keyakinan (aqidah) islamiyah yang abadi (kekal) dengan adanya kesadaran dan keiman yang mendalam supaya ditengah-tengah masyarakat nanti mampu berintaraksi, bergaul dan berperilaku sosial sebaik mungkin, serta mampu menjaga keseimbangan akal yang matang dan berprilaku dengan bijaksana.[10]

Sosial keagamaan menurut saya adalah kegiatan ibadah yang diyakini dan diterapkan di kehidupan masyarakat atau lingkungan, khususnya di Kabupaten tapanuli selatan yang mayoritas penduduknya beragama islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk pelaksanaan manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

[10] Abdul Hamid, *Ilmu Ahlak* (Bandung: Pustaka Cipta, 2009), hlm 26

2. Untuk mengetahui Pengaruh manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan terhadap pengamalan agama dalam masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi DPRD dalam pengawasan pembangunan sosial kegamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan

E. Manfaat Penelitian

Sementara itu, penelitian ini berguna bagi:

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengawasan pembangunan sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Memberikan informasi tentang manajemen strategi dalam pengawasan pembangunan sosial kegamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dalam manajemen strategi pengawasan yang efektif dan efisien.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar lebih meningkatkan intensitas kegiatan dalam pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengikuti kegiatan mengenai pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh (DPRD), dapat berperan aktif dan

mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga dapat memperoleh manfaat serta menambah pengetahuan dari kegiatan tersebut.

3. Untuk penulis sendiri, dapat menambah ilmu pengetahuan dari hasil penelitian ini dan bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

F. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penjelasan dari pembahasan dalam isi kandungan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan berdasarkan bab demi bab serta beberapa sub bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan: yang membahas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan serta Kegunaan penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: yang Berisikan, Manajemen Strategi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelayan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslimdi Kabupate Tapanuli Selatan.

Bab III Metode Penelitian: Berisikan, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data

Bab IV Pembahasan : Berisikan , Profil DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Struktur Organisasi DPRD Priode 2019-2024, Pelaksanaan, Peranan, serta Hambatan dan Solusi Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V Penutup : Berisikan, Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Manajemen Strategi

1. Pengertian Manajemen Strategi

Banyak sekali ditemukan definisi manajemen strategi yang dikemukakan baik secara etimologi dan teori para ahli. Adapaun yang dimaksud dengan manajemen strategi ialah keputusan dan tindakan manajemen yang berkaitan dengan kinerja jangka panjang sebuah lembaga/organisasi. Manajemen strategi mempunyai cakupan luas dalam fungsi dasar manajemen, yaitu mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling.

Beberapa teori yang menjelaskan tentang arti dari manajemen strategi yaitu:

a. J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen menjelaskan bahwa manajemen strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan yang dapat menetukan kinerja jangka panjang perusahaan.
b. Hadari Nawawi. Mendefenisikan manajemen strategi ialah suatu perencanaan (*planning*) berskala besar (perencanaan strategis) yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh (visi, dan didefenisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi sehingga memungkinkan organisasi mampu berintraksi secara efektif (misi) dalam menghasilkan perencanaan operasional.

c. Fred R. David. Mengatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional sehingga organisasi mampu mencapai tujuannya.[11]

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah seni yang dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh manajer dan anggotanya guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan sehingga memperoleh sebuah hasil yang memuaskan.

Betapa pentingnya peran manajemen strategi untuk meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi/lembaga.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk proses manajemen strategi dalam organisasi/lembaga yaitu:

a. Mengembangkan visi yang transparan, kemudian menterjemahkan ke dalam pernyataan sebuah misi yang bermakna untuk dicapai sebagai tujuan.
b. Melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan sebuah lembaga/organisasi.
c. Memperhatikan lingkungan sekita guna mengetahui peluang serta ancaman yang memungkinan dihadapi oleh lembaga/orgnisasi.
d. Mengidentifikasi berbagai factor sebagai kunci keberhasilan dari lembaga maupun organisasi.
e. Melakukan analisis terhadap persaingan sekitar .

[11] Mukhlis Catio, Sarwani dan Rukman, *Manajemen Strategi* (Tanggerang: Indigo Media, 2021) hlm 4-5

f. Menyusun sasaran dan tujuan lembaga/organisasi.

g. Merumuskan berbagai alternatif strategi dan memilih strategi yang tepat.

h. Menterjemahkan rencana strategi ke dalam rencana tindakan

i. Menentukan pengendalian yang tepat.[12]

Manajemen strategi merupakan kajian yang memiliki perbedaan pada dasarnya dengan kajian manajemen pada umumnya. Manajemen strategi dalam spesifik diarahkan untuk menyikapi perubahan lingkungan yang dinamis atau menyikapi tuntunan peningkatan kinerja organisasi menurut Taufiqurrahman manajemen strategi memiliki karakteristik diantaranya:

a. Bersikap dalam jangka waktu panjang

b. Bersifat dinamis

c. Perlu di arahkan oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak

d. Berorientasi pada masa depan dan,

e. Senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya dari semua sumber daya baik itu sosial, ekonomi, politk yang tersedia.

2. Proses Manajemen Strategi

Untuk memperoleh sebuah hasil yang efektif dan efisien dalam sebuah kinerja baik dalam organisasi maupun lembaga, tentu tidak terlepas dari sebuah proses. Dalam hal ini Taufiqurrahman menjelaskan beberapa proses yang ada pada manajemen strategi antara lain:

a. Identifikasi pada misi maupun sasaran organisasi/lembaga

[12] Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Strategi* (Garuthawaca) hlm 2

b. Analisa lingkungan yang berada diluar organisasi/lembaga (eksternal)
c. Identipfikasi bagi peluang serta ancaman
d. Analisa sumber lingkungan yang berada didalam organisasi (internal) daya organisasi
e. Identifikasi pada kekuatan maupun kelemahan
f. Merumuskan berbagai strategi
g. Melaksanakan perencanaan strategi yang telah di buat
h. Evaluasi strategi[13]

Ada beberapa fungsi pokok dari manajemen atau tahapan dan langkah dalam manjemen yang merupakan suatu proses untuk memudahkan suatu organisasi/lembaga agar memperoleh tujuannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam mengawali setiap aktivititas pada sebuah pada pekerjaan dalam organisasi bisnis, dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi kedepannya.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian didefenisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur

[13] Efri Novianto, *Mnajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019) hlm 14

organisasi sesuai dengan tujuan lembaga yang tertuang di dalam visi dan misi oraganisasi/ lembaga, serta lingkungan yang berada disekitar.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasinya. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controling adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan control atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan dengan sesuai aturan main dan prosedur yang telah dibuat. Selain itu fungsi manajemenini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan.[14]

[14] Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi* (Malang : Ae Publishing 2021) hlm 10-13

3. Manfaat dan Tujuan Manajemen Strategi

Manajemen strategi sangat diperlukan pada suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan adapun perumusan strategi untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien menurut Jauch dan Glueck) yaitu:

a. Dapat berpengaruh untuk meningkatkan perfoma baik itu sebuah perusahaan, lembaga dan organisasi dengan melalui serangkaian perbaikan manajemen, partisipasi serta komitmen dari seluruh anggota yang berada pada perusahaan atau organisasi.
b. Dapat menentukan arah perusahaan guna mencapai tujuan utama yang telah ditentukan
c. Dapat memperoleh hasil keputusan yang terbaik bagi perusahaan dan organisasi
d. Memberikan antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan
e. Memberi arahan bagi berjalannya perusahaan dalam mencapai tujuan.[15]

B. Pengawasan DPRD Tapanuli Selatan

1. Penegrtian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berada di tingkat kabupaten kota yang disingkat dengan (DPRD), merupakan suatu lembaga untuk mewakilkan suara rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara,

[15] Mukhlis Catio, Sarwani dan Rukman, *Manajemen Strategi* (Tanggerang: Indigo Media, 2021) hlm

pengawasan pemerintahan daerah kabupaten/kota sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan. DPRD kabupaten/kota terdiri dari berbagai anggota partai politik yeng merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang berada didaerah kabupaten/kota melalui pemilihan umum. Dalam UUD 1945 yang merupakan hasil dari amandemen berisikan bab khusus yang membahas mengenai pemerintahan daerah, yakni bab VI , yang memiliki tiga pasal, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. ketiga pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD1945, yang disahkan pada tahun 2000.

Ketiga pasal yang disebukant menjadi landasan dan sebuah dasar konstitusional, pada perundang-undangan pemerintahan daerah juga lembaga legislativ daerah. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, perihal lembaga perwakilan daerahnya yang sering disebut DPRD, merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah.[16]

Pengawasan DPRD memiliki ciri khas dibandingkan dengan pengawsan hukum (pengwasan lembaga peradilan) atau pengawasan oleh ombudsman. Pengawasan DPRD adalah pengawasan politik sehingga pengawasan DPRD sering disebut sebagai *political oversight* atau pengawasan politik.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 149 ayat (1) UU Pemda, DPRD memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

[16] Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Surabaya:Airlangga University Press 2020) hlm 192

1. Pembentukan perda
2. Anggaran dan
3. Pengawasan

Namun yang akan dibahas pada proposal ini adalah, pengawasan DPRD bersifat pengawasan aktif sekaligus pengawasan pasif. Pengawasan aktif berarti inisitif dilakukannya pengawasan tidak bergantung pada pihak lain yang meminta dilakukan suatu tindakan pengawasan.

Mengenai pengawasan badan perwakilan rakyat (DPRD), Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

"*pengawasan badan legislatif atas tindakan lembaga aksekutif ini berwujud pertama-tama menanyakan sesuatu tentang tindakan tertentu dari pemerintah, dan tergantung dari jawaban pemerintah dan pembicaraan berikut, sampai mana kebijaksanaan pemerintah dapat disetujui oleh badan legislative atau tidak*"

Berdasarkan UU Pemda Indonesia, fungsi Pengawasan DPRD meliputi sebagai berikut:

a. pengawasan terhadap rancangan perda yang diajukan oleh kepala daerah. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk ikut membahas dan menyetujui rancangan perda.
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk meminta laporan keterangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.[17]

3. Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah

DPRD yeng merupakan anggota legislativ, tingkat kabupaten/kota merupakan pemilik kedudukan yang menjadi perwakilan rakyat, dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004, sangat kuat pengaruhnya dibandingkan, dengan kekuasaan kepala daerah (eksekutif). Kedudukannya disini bukanlah sebagai subordinasi dari pemerintahan daerah melainkan, sedemikian penting kaitannya dengan kedudukan sebagai lemabaga legislative, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, di daerah serta dalam kedudukannya sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik dari berbagai fraksi, kedudukan DPRD secara politis dapat dikatakan sangat kuat. Fungsi legislative yang dijalankan oleh para anggota DPRD ini masih belum maksimal, inisatif di bidang legislative lebih banyak didominasi oleh pemerintah Daerah. Paling tidak ada 2 (dua) hal penyebabnya:

a. Dapat menguasai informasi dan daya dukungan sarana-prasarana dikuasai oleh pihak pemerintahan Daerah (Birokrasi)
b. Kualitas pada pendidikan, serta pengalaman kerja birokasi di bidnag pemerintah daerah, yang lebih banyak dan lebih unggul.[18]

---

[17] *Ibid* 200-201
[18] Jurnal, Kemas Arsyad, *DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Perubahan UUD 1945*

C. Pembangunan Sosial Keagamaan

1. Pengertian Pembangunan Sosial

Menurut Rahman pembangunan social adalah suatu proses yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau rakyat, satu keadaan dimana segala keperluan social dipenuhi, peluang-peluang diwujudkan, dan masalah social ditangani dengan baik.

Pelaksanaa dengan berbagai dan beragam program pada pembangunan di bawah paying *paradiga developmentalisme*, yang bersifat sentralistis dan *material oriented* selama ini, masih kurang dan minim dalam memberi peluang (kesempatan) bagi pihak pemerintah daerah agar dapat mengembangkan kapasitasnya dan menyelenggarakan serta melaksanakan roda pemerintahan kemudian merencanakan pembangunan secara partisipatif. Betapa pentingnya kekuatan juga kendali pemerintahan pusat terhadap pemerintah daerah pada masa lalu, hingga berkurangnya kreatifitas dan hilangnya inovasi bagi aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta peran pada tanggung jawabnya.[19]

Keputusan dan kebijakan yang dilakukan pada pembangunan Indonesia masa, era orde baru, yang berlandaskan pada teori serta konsep modernisasi, adalah menjadi penyebab pada fokus juga ruang lingkup pembangunan, dititik beratkan pada upaya pembangunan sosial dan ekonomi. Sebuah ukuran sosial kultural, struktural maupun prosesual terabaikan dan tidak terjalin secara integral

[19] Ahdi Makmur, *Ulama dan Pembangunan Sosial* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016) hlm 60

dan interdependen, sehingga para ahli pembangunan dari berbagai perspektif keilmuan masyarakat untuk segera melakukan redefenisi, rekonstruksi dan reformasi atas paradigma pembangunan yang diklaim sebagai biang keladi berbagai problematika sosial itu.

Upaya peletakan, dasar perencanaan program pada pembangunan, yang berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi menajadi sangat penting yang harus di prioritaskan, bagi kemajuan pemerintah Daerah kedepan. Selain ditata, untuk menjadi arah pembangunan yang tidak hanya terukur dan terencana, juga harus aspiratif dengan merekam berbagai nilai, norma dan kearifan-kearifan lokal.

2. Perencanaa Dalam Prespektif pembangunan

Banyak pengertian dan pandangan mengenai berbagai makna tentang perencanaan, maka Safi'I menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah:

1. Proses dan tahapa, untuk memilah dan memilih suatu tindakan yang baik dari beberapa metode alternative untuk mencapai tujuan dengan, efektif dan efisien.
2. Berfungsi sebagai pedoman, dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
3. Mengambil keputusan guna menerangkan dari pada apa, bilaman, dan siapa yang hendak melakukannya. Dalam hal ini berarti perencanaan pembangunan soasial adalah sebuah proses atau langkah awal agar bisa

mempersiapkan secara tersusun (sistematis), dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas, tetapi diorientasikan untk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam suatu kerangka perumusan kebijkan yang akurat.

Adapun hal-hal yang harus di ketahui sebelum memulai sebuah perencanaan pembangunan adalah:

1. Mengetahui permasalahan (*problem*) yang akan dihadapi, yang berkaitan erat dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada pada lembaga/organisasi terutama pada Sumber Daya Manusianya (SDM)
2. Tujuan maupun sasaran terhadap rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana kegiatan.
3. Membuat kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan jala alternativ yang dipandang paling baik dan tepat.
4. Penjabaran serta menjelaskan secara rinci dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit dan hendak dilakukan.
5. Jangka dan batas waktu, untuk pencapaian tujuan, harus jeli dalam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. adanya kordinasi antara berbagai pihak yang bersangkutan.
   b. Adanya ketetapan konsistensi, dengan variable sosial ekonomi.
   c. adanya penetapan pada skala dan prioritas.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penyusunan, dalam sebuah perencanaan pembangunan di daerah maka hal pertama kali yang harus dilakukan

adalah mengidentifikasi masalah dan potensi-potensi serta pembangunan daerah. Identifikasi ini dilakukan sebagai kegiatan dalam proses perencanaan (*pra-plening*) denagn memberikan gambaran dan arahan secara keseluruhan anggota, tentang sifat atau karakter, tingkat, struktur dan arah kegiatan sosial pembangunan daerah. Setelah itu dilihat basic constrains-nya, menganalisis potensi dan masalah secara menyeluruh, masalah-malalah sektoral, masalah-masalah regional yang disertai dengan data angka secara kuantitatif sebagai bekal penyusunan pembangunan daerah. [20]

D. Bimbingan Kehidupan Sosial Beragama

1. kegiatan penerangan agama diarahkan, untuk semakin menyatu dengan penerangan nasional, dengan memanfaatkan semua media yang ada rri dan tv.
2. Diusahakan peningkatan pengawasan pembangunan social keagamaan dikalangan masyarakat, dengan membina kelompok-kelompok remaja masjid.
3. Diusahakan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang keagamaan untuk mencegah kerawanan social politik keagamaan.
4. Meningkatkan dan melakukan perubahan sebagai peran terhadap umat beragama dalam pembangunan nasional sehingga mereka memiliki potensi yang lebih positif terhadap pembangunan, karena merasa memiliki program pembangunan nasional.

[20] Anwar Firmansyah dan Tiffani Setyo Pratiwi, *Agama dan Pembangunan Dalam Melihat Keberkaitan Agama Terhadap Proses Pembangunan dan Modernisasi*, Jurnal (Yogyakarta: Uneversitas Teknologi Yogyakarta,)

5. Mengaktifkan fungsi lembaga, untuk pranata keagamaan secara lebih efektif dan kreatif dengan menyelaraskan, membuat kebijakansebuah program pembangunan nasional.[21]

Upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman serta pengalaman ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama diukur dari Indeks Kesalehan sosial (IKS). Dalam penyelenggaraan Sosial keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan dikalangan masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan. [22]

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah ada lebih dulu, sangat berfungsi dan berguna, untuk menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan, antara penelitian yang akan ataupun sedang dilakukan padasaat ini dengan penelitian yang telah dilakukan, sebelumnya oleh peneliti dengan orang yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas Di Bidang Sosial Keagamaan" penulis menjelaskan tentang peraturan-peraturan serta cara seorang pemimpin Banyumas yang mengkordinir masyarakatnya dengan baik dalam bidang sosial keagamaan. Untuk memberdayakan masyarakat tidak cukup hanya den

[21] Departemen Agama R.i, *Eksistensi dan Lngkahnya* (Jakarta: Departemen Agama) hlm 66
[22] Kemenag RI, *Rencana Strategi Kementrian Agama Tahun 2020-2-24,* Hlm 14

gan melakukan reformasi kelembagaan di tingkat pemerintahan desa. Oleh karenanya pemerintahan Kabupaten Banyumas mengeluarkan perda yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat.[23]

2. Skripsi yang berjudul "Perubahan Sosial Ekonomi masyarakat Muslim Di Desa Kecubung Terbanggi Besar Lampung Tengah. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai peningkatan pendapatan di bidang sosial ekonomi masyarakat muslim di desa Kecabung Terbanggi Lampung Tengan,jika memiliki niat yan sungguh-sungguh apaun yang diharapkan akan bisa didapatkan. Maka sebaliknya ketika semua sudah direncanakan jika tidak sungguh-sungguh maka akan menjadi sia-sia. [24]

Adapun perbedan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya buat adalah:

1. Penelitian terdahulu pembahsannya berfokus kepada Pemimpin pemerintahannya.
2. Penelitian terdahulu pembahasan pokok yaitu pada perubahan ekonomi masyarakatnya.
3. Penelitian terdahulu memfokuskan pengembangan masyarakat muslim pedesaan dalam pengembangan perekonomian.

Sedangkan penelitian yang saya buat yaitu membahs:

1. Manajemen staretigi pengembangan masyarakat dalm sosial keagamaan.
2. Pengelolaan DPRD dalam pembangunan sosail secara merata di berbagai desa khususnya di Kecamatan Sipirok.

---

[23] https://media.neliti.com/media/publications/121929-ID-analisis-terhadap-kebijakan-kebijakan-pe.pdf di akses pada tgl 29 January 2021 pkl 09.25

[24] https://media.neliti.com/media/publications/121929-ID-analisis-terhadap-kebijakan-kebijakan-pe.pdf di akses pada tgl 29 January 2021 pkl 09.25

Pengembangan pemahaman serta pengetahuan masyarakat desa tentang Keagaaman melalui pembangunan sosial keagamaan yang di buat olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan. Sebagai suatu konsep, pembangunan sosial lebih menekankan kepada pembangunan komunitas, atau kelompok masyarakat, dari pada orang-perorang atau individu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode Pendekatan pada penelitian kali ini ialah menggunakan jenis metode kualitatif. Secara harfiah yang dimaksud penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui tahapan atau prosedur kuantifikasi, dengan bentuk yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata, tertulis, atau lisan dari orang atau pelaku yang telah diamati dan diwawancarai.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting teryentu yang berada dalam kehidupan rill dengan maksud menginvestigasi dan memahami phenomena, apa, mengapa, bagaimana terjadinya suatu peristiwa yang di teliti.[25] Dengan penelitian yang dilakukan menggunakan, pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data berupa ungkapan dari hasil wawancara atau catatan orang itu sendiri kemudian tingkah laku orang telah di terobservasi.

Penelitian ini mencari makna, fakta serta esensi dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui dokumen-dokumen tertulis dan juga mengkaji sikap atau perilaku elite pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan,

[25] Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Suka Bimi: CV Jejak 2017) hlm 45

menggerakkan, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Data primer yang diperoleh pada penelitian ini, bersumber dari kebijakan dan peraturan di bidang sosial keagamaan yang diputuskan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berbentuk pelaksanaan kemudian tulisan, dan telah disimpan dalam bentuk dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Data-data ini dibutuhkan supaya mengetahui kebijakan dan keputusan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap perubahan masyaraknya.[26]

Kemudian untuk mengetahui, proses dari perencanaan dan pelaksanaan diperlukan data-data yang bersumber , dari informan langsung yang terlibat pada penelitian ini. Dalam wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dan jawaban , informan yang peneliti wawancarai yaitu, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli selatan, Sekretariat Daerah (Sekda), Kepala Bagian, yang terkait dengan judul dalam bidang sosial-keagamaan. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan, data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian tentang keagamaan, dan makalah-makalah yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penilitian kualitatif memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan. **.**

Pada penelitian ini juga, menggunakan penelitian langsung ke lapangan serta mengutamakan sifat realitas yang nyata sehingga terbangun secara sosial,

[26] Muh. Fitrah, & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 44

hubungan erat antara peneliti dan objek yang diteliti. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen strategi pelayanan DPRD Tapanuli Selatan terhadap pembangunan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian, skripsi ini dilakukan di perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terletak di Jalan. Desa Tolang, Kecamatan Sipirok Kab Tapanuli Selatan pada Tgl 25 Maret 2021-5 Juni 2021.

C. Informan Penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang telah memberikan serta menjawab pertanyaan yang diajukan, sehingga memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga informan, yaitu

Nama Narasumber	**Jabatan**
Muhammad Paisal Siregar	Ketua Praksi Hanura DPRD Kab. Tapanuli Selatan
Arwan Siregar S.sos	Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Program dan Keuangan DPRD Tapanuli Selatan
Erlina Hasibuan	Kepala Bagian Administrasi

	Kesekretariatan Program dan Keuangan DPRD Tapanuli Selatan

D. Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Sumber prim, yaitu data ini penulis dapatkan langsung dari, salah satu anggota DPRD Ketua Praksi Hanura Kabupaten Tapanuli Selatan Bapak Muhammad Paisal Siregar ST.

2. Sumber sekunder, adapun data dan informasi yang penulis peroleh, sebagai pelengkap dan pendukung dalam penelitian ini dari,

a. Data-data tertulis yang ada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan.

b. Masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Denngan mengumpulkan berbagai data adalah suatu cara yang dilakukan guna mempermudah dalam penyusunan skripsi ini secara terperinci. Pada penelitian ini, sebagai peneliti, menggunakan tiga cara (teknik) pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga

diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara ini merupakan alat atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[27] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik wawancara secara langsung dengan tanya jawab kepada anggota DPRD Tapanuli Selatan beserta pengurus yang ada di dalam lembaga tersebut yang ikut serta dalam peningkatan pelayanan pembangunan dalam bidang sosial keagamaan masyarakat pedesaan.

2. Observasi

Observasi juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dimana peneliti harus turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dilakukannya observasi ini ialah untuk mencermati dan menggali secara mendalam mengenai aktifitas Instansi pemerintah DPRD dalam memanajemen strategi pelayanan dalam pembangunan sosial keagamaan di masyarakat pedesaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar atau foto, karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian..[28]

---

[27] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

[28] Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 165

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses guna mencari serta menyusun dengan cara sistematis, data yang ditemukan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami temuan yang didapat di informasikan kepada orang lain secara terprinci dan jelas. Analisis data pada penelitian kali ini menggunakan analisis data kualitatif.[29]

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu teknik analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data-data yang terkumpul mengenai tentang bagaimana strategi manajemen pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan terhadap pembangunan dalam bidang sosial keagamaan.

Adapun siklus yang digunakan pada teknis analis data kali ini adalah yang dikemukakan oleh Faisal yaitu analisa data kualitatif:

1.Reduksi Data

Data yang sudah didapatkan kemudian ditulis dengan bentuk laporan atau data yang sudah terperinci. Menyediakan laporan yang sudah disusun berdasarkan data yang didapatkan dan dirangkum, kemudian memimilih hal-hal pokok, yang berkaitan dengan manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

[29] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248

2.Penyajian Data

Setelah data diperoleh yang menyangkut permasalahan pokok dan dibuat berbentuk matriks untuk mempermudah dalam menentukan pola suatu hubungan dengan yang lainnya dan menyangkut dengan judul skripsi.

3.Menyimpukan dan memvripikasi

Penyimpulan adalah kegiatan atau langkah untuk kelanjut dengan menyajikan data secara sistematis dan menjelaskan pembahasan penelitian secara tegas dan memiliki dasar yang kuat.[30]

[30] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, hlm 143-144

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1.Letak Geografis

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan bertempat di Jl. Desa Tolang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Letaknya sangat strategis tidak jauh dari jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin berkunjung dan berkepentingan.

Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan berdiri pada, dimana kantor DPRD didirikan di atas tanah pekarangan masyarakat Dano, yang di beli oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan perkantoran dari seluruh lembaga/instansi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun luas tanah tempat didirikannya bangunan perkantoran yaitu sekitar, kurang lebih lima Hektar, yang letaknya di Desa Tolang Kecamatan Sipirok, berdekatan juga dengan desa Dano.

Pada Bab I bagian batasan Istilah penulis membatasi kajian pembahsan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan hanya pada periode 2019-2024. Adapun DPRD yang terpilih sebagai anggota sebanyak 35 orang yang resmi dilantik ketua pengadilan Negri (PN) Padang Sidimpuan, oleh Bapak Jiluis Panjaitan dalam siding paripurna Istimewa DPRD di sipirok, tepatnya hari selasa 13 Agustus 2019.

Berikut Daftar Anggota DPRD di Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2019-2024.[31]

Dari Dapil Tapsel I;

No	NAMA ANGGOTA	PARTAI
1	Muhammad Yunus	Gerindra
2	Armen Sanusi Harahap	Gerindra
3	Derliana Siregar	Golkar
4	Mukmin Saleh Siregar	Nasdem
5	Sylvan Rahmad Aimin Siregar	PAN
6	Muhammad Faisal Siregar	Hanura

Dari Dapil Tapsel II

N	NAMA ANGGOTA	PARTAI
1	Ipong Dalimunthe	PKB
2	Husin Sogot Simatupang	Gerindra
3	Muhammad Rawi Ritonga	Golkar
4	Sawal Pane	PAN

[31] Data ini diambil Peneliti Langsung dari Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021

Dari Dapil Tapsel III

No	Nama Anggota	Partai
1	Abdul Basith Dalimunthe	Gerindra
2	Eddy Arryanto Hasibuan	Gerindra
3	Edison Rambe	Golkar
4	Ali Adanan Naution	Golkar
5	James Watt Siregar	Nasdem
6	Maysaroh	PPP
7	Bayung Muhammad Holil	PAN
8	Bontor Panjaitan	Hanura
9	M Husin Dalimunthe	Demokrat

Dari Dapil Tapsel IV

No	Nama Anggota	Partai
1	Doly P Parlindungan Pasaribu	Gerindra
2	Harmeni Batubara	Gerindra
3	Andi Jaka Sipahutar	PDI-P
4	Rahmat Nasution	Golkar
5	Nurhayati Pane	Golkar
6	Ledy Namarina	Nasdem
7	Baginda Pulungan	PPP

8	Borkat	PAN
9	Haris Yani Tambunan	Hanura

Dari Dapil Tapsel V

No	Nama Anggota	Partai
1	Rocki Anugrah P Gultom	Gerindra
2	Zulkarnaen Dalmunthe	Golkar
3	Andes Mar Siregar	Golkar
4	Eddi Sullam Siregar	Nasdem
5	Ok Hazmi Usman Siregar	PPP
6	Mahmud Lubis	PAN
7	Robinton Simanjuntak	Hanura

B. Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (Sembilan) sub bagian dan Beserta staf. Bagian struktur organisasi dan tata kerja secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Tapanuli Selatan.

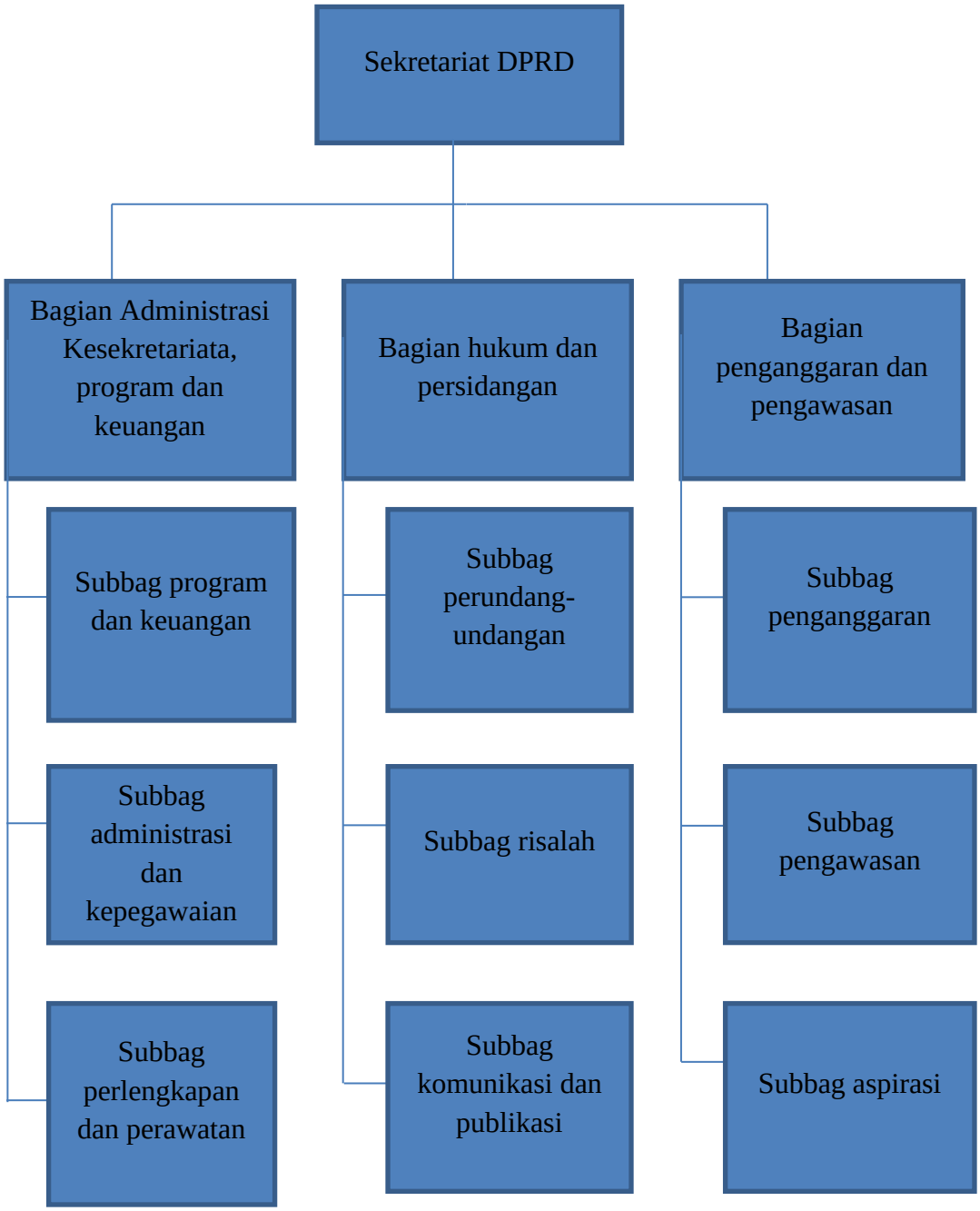

Sumber: Data Kepengurusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019/2024

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berikut Jabatan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Husin Sogot Simatupang	Ketua
2	H.Rahmat Nasution, S.sos	Wakil Ketua
3	H.Borkat S.sos. MM	Wakil Ketua

Komisi A bidang pemerintahan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Rocky AP. Gultom, SH	Ketua
2	Baginda Pulungan	Wakil Ketua
3	James Watt	Sekretaris
4	Mhd Yunus Pane	Anggota
5	Nurhayati Pane,SH	Anggota
6	Mhd Rawi Ritonga, SPd	Anggota
7	H.Mahmud Lubis, S,Ag	Anggota
8	Eddi Sullam Siregar	Anggotsa
9	Drs,H, Husin Dalimunthe	Anggota
10	Robiaton Simanjuntak	Anggota

Komisi B bidang Ekonomi Pembangunan

No	Nama Anggpta	Jabatan
1	Andes Mar Siregar	Anggota
2	Haris Yani Tambunan, SH, MM	Wakil Ketua
3	Harmeni Batu Bara, SH	Sekretaris
4	Eddi Arryanto Hasibuan, SH	Anggota
5	Drs,H. Ali Adanan Nasution	Anggota
6	Edison Rambe, SE	Anggota
7	Bayung M. Holil, ST	Anggota
8	Sawal Pane, SE,M,SI	Anggota
9	Ledy Namarina	Anggota
10	Muhammad Faisal Siregar,ST	Anggota
11	Ok Hazmi Usman Srg, SH	Anggota
12	Andi Jaka Sipahutar	Anggota

Komisi C Bidang Pendidikan dan Kesehatan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Sylvan R.Amin Srg, S, Hut	Ketua
2	Zulkarnaen Dalimunthe	Wakil Ketua
3	Armen Sanusi Harahap	Sekretaris
4	Dolly Putra Par lindungan S. Pt, MM	Anggota

5	Abdul Basith Dalimunthe,SH	Anggota
6	Derliana Siregar, SH	Anggota
7	Mukmin Saleh Siregar, ST,M,si	Anggota
8	Bontor Panjaitan	Anggota
9	Dra. Maisyaroh	Anggota
10	Ipong Dalimunthe	Anggota

C. Pelaksanaan Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, khususnya pasal 148. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Pelaksanaan manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan yaitu dapat menyelenggarakan kegiatan sosial keagamaan dan berhasil menumbuh kembangkan spiritual dikalangan masyarakat muslim Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pemahaman nilai-nilai ajaran islam. Dengan adanya dukungan dan partisipasi DPRD berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan dan memberikan apresiasi kepada ajang perlombaan yang dibuat tingkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini bertujuan untuk:

1.Meningkatkan kualitas pemahaman, pengajaran serta pengamalan ajaran dalam beragama.

2. pemenuhan serta pelayanan akan kebutuhan beragama yang berkualitas dan merata

3. meningkatkan dan memanfaatkan kulalitas untuk mengelola potensi sosial keagamaan.

4. peningkatan kualitas ibadah dan mempererat persaudaraan diantara masyarakat

5. meningkatkan akses pendidikan serta menekankan tentang perlunya sosial keagaamaan bagi anak-anak, remaja dewasa dan para orang tua[32]

Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen strategi DPRD dalam melayani masyarakat guna meningkatkan pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan penelitin dengan mewawancarai Bapak Paisal Siregar selaku Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa fungsi manajemen strategi terdapat pada visi dan misi DPRD Tapanuli Selatan yaitu:

Visi Dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan

1.Visi

[32] Hasil Wawancara bersama bapak Paisal Siregar ST Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Pada Hari Senin tgl 5 April 2021, pkl 10.20 Wib

Merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana secretariat DPRD Kabupatan Tapanuli Selatan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipastif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Pada renstra terdahulu Visi secretariat DPRD Tapanuli Selatan adalah "Sekretariat DPRD yang handal dan propesional dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD"

Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut:

1. Handal mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, aparatur secretariat DPRD memiliki kesiapan mental, fisik, tenaga dan pemikiran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi terwujudnya tata usaha dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
2. Propesional merupakan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan untuk menudukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD dengan penguasaan yang baik terhadap bidang tugas dan dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Funngsi**, Tugas, dan Wewenang DPRD merupakan fungsi, tugas dan wewenag yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penysusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dan peraturan tata tertib Kabupaten Tapanuli Selatan No. 01 Tahun 2010 tentang peraturan tata tertib DPRD.

1.Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan serta menegtahui peran dan fungsi serta program-program yang dijalankannya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari pihak yang berkepentingan (Sekretariat) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan yang dihadapi , misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya propesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatnya pola dan mekanisme kerja yang efektif, efisien dan disiplin.
4. Meningkatnya penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

   Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD,

maka dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2016-2021 merupakan salah satu SKPD pelaksanaan Misi keempatyaitu: "Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkelanjtan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa" dengan tujuan RPMJD "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Govemace*) dan bersih (Clean Govemace) serta professionalisme.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Visinya "Menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD". Dengan demikian visi dan misi yang dijelaskan sebelumnya, bahwa berkaitan dengan kajian skripsi ini yang menjelaskan salah satu pelaksanaan DPRD dalam pengawasan pembangunan dalam bidang sosial keagamaan.[33]

D. Pengaruh Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengaruh dalam (KBBI) ialah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah daya tarik dari suatu benda ataupun orang yang dapat merubah seseorang atau suatu yang ada disekitar. Dan berpengaruh kepada orang-orang sekitar.

[33] *Perencanaan Strategi Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan* Hlm41-42

Pengaruh DPRD dalam pengawasan pembangunan dalam bidang sosial keagamaan merupakan kunci perubahan dan kesuksesan dari lembaga guna mensejahterakan masyarakat yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan demikian antara pihak pemerintahan dengan masyarakat dapat menentukan arah yang harus diperbaiki baik sikap, moral dan berperilaku sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Pengaruh DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim dikabupaten Tapanuli Selatan yaitu mampu memberikan motivasi baik dalam lembaga maupun terhadap masyarakat, sehingga dengan begitu semua pihak akan damai dan bisa menjalankan tugas dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Dengan demikian ada beberapa pengaruh khusus dalam pengawasan pembangunan dalam bidang sisoial keagamaan muslim di Kabupaten tapanuli Selatan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Faisal Siregar selaku anggota DPRD di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1.Merubah Pola Pikir serta Konsep pada masyarakat

Untuk merubah pola pikir masyarakat agar lebih berkembang terutama dalam bidang sosial kegamaan yang merupakan hal pokok yang harus dijalankan terutama bagi umat muslim yang selalu senantiasa diajarkan Hablumminallah dan Hablumminannas, mencintai Allah dan mencinta manusia sebagai bentuk kepedulian dan menjaga silaturahmi guna mempererat tali persaudaraan khususnya umat muslim.

Hal yang harus dilakukan untuk perubahan adalah memberikan motivasi ataupun dorongan kepada masyarakat terutama bagi anak-anak, remaja yang menjadi *Agen of the change* untuk meningkatnya daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Yaitu:

1.Kebutuhan pisik, yang meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, dan kebutuhan yang lainnya.

2. Kebutuhan aman, keamanan dan perlindungan dari budaya fisik dan emosional.

3.kebutuhan sosial, yang meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan.

4. kebutuhan pengakuan, Faktor-faktor internal misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta factor-faktor eksternal misalnya. Status, pengakuan, dan perhatian.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, dorongan yang mampumemebentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan pemenuhan diri.

2. Membangun Kebersamaan

Hal pokok yang harsu diperhatikan dalam menangani suatu kegiatan maupun pekerjaan yaitu terjalinnya kerjasama dengan baik, antara sesame anggota DPRD. Pemerintahan Daerah dan paling utama adalah masyarakat, dapat menghormati satu sama lain dan menghilangkan kesenjangan sosial agar suatu pekerjaan yang dilakukan itu terasa mudah dan ringan.

3.Memberikan Keteladanan

Dengan bergulirnya suatu reformasi menjadikan DPRD serta masyarakat sadar bahwa pola pemerintahan yang sentralistik justru menjadi sebuah ketergantungan dan menghilangkan kemandirian pada masyarakat. Seiring hal tersebut mka timbul sebuah keinginan yang muncul dari pemerintah dan masyarakat agar melaksanakan otonomi pemerintahan secara mandiri, sebagai langkah yang ditempuh untuk pengawasan pembangunan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan mewujudkan program-program dalam kesejahteraan bersama khususnya dibidang sosial keagamaan.

Dengan demikian masyarakat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berlomba-lomba dalam meningkatkan kegiatan sosial keagamaan berupa Tablig Akbar yang merupakan kegiatan rutin satu kali dalam sebulan, kemudian merayakan PHBI dan berbagai kegiatan lainnya. Dalam Sebuah proses pembangunan baik dibidang ekonomi, pendidikan maupun sosial keagamaan yang dilakukan untuk lebih menjamin sebuah kerja sama, bukan saja dalam pembangunan daerah masyarakat dilibatkan namun tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai bentuk upaya pelayanan terhadap masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah untuk melibatkan masyarakat, pemerintah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan musrembang. Musrembang ini dilakukan di setiap desa dari daerah yang ada di Indonesia guna mengetahui apa saja yang perlu untuk

dibangun dan diperbaiki guna meningkatkan serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA). Dari sinilah kemudian pintu demokrasi juga telah dibukakan untuk masyarakat agar turut berpasrtisipasi dalam bidang pembangunan

Melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk dapat mengelola Sumber Daya Alam di Kabupaten Tapanunli Selatan yang baik perencanaan merupakan inti dari manajemen hingga semua kegiatan organisasi yang bersangkutan harus didasarkan kepada rencana tersebut karena dengan perencanaan memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka secara baik. Setiap Dewan Perwakilan Rakyat di mana saja pasti mereka menyadari betapa pentingnya perencanaan dalam kehidupan sehari-hari saja kita pasti memiliki perencanaan tersendiri oleh karena itu seorang pemimpin harus prosedur yang ada.[34]

Manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan ini juga berpengaruh terhadap masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh bapak Sallim Pane selaku kepala Desa Tolang dan Bapak Borkat Siregar sebagai kepala Desa Barnang Koling, menjelaskan bahwa peraturan serta kebijakan dari DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Priode 2029/2024 ini, banyak memeberi pengaruh, dalam peningkatan keagamaan, seperti mengusulkan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintahan, agar setiap anggota pengurus masjid,

[34] Hasill Wawancara Bersama Bapak Paisal Siregar ST Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan 8 April , 2021, Pkl 11.00

guru mengaji, kegiatan keagamaan, dan sumbangsih berupa bantuan kitab Al-quran kepada anak-anak didesa, dan masih banyak lagi.

Hal ini merupakan tindakan penting sebagai motivasi bagi masyarakat di berbagai desa yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, supaya menanamkan prinsip untuk bercita-cita tinggi, menjadi anggota atau pemimpin Negri membangun dan memajukan kegiatan-kegiatan kegamaan, serta adil, peduli, kepada masyarakat tanpa membedakan kasta, jabatan dan kekuasaan.[35]

E. Hambatan yang Dihadapi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Menjadi anggota legislative dalam sebuah daerah yang cukup besar dan luas, tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi, baik berupa tantangan maupun rintangan yang datang dari berbagai arah. Karna pada Manajemen Strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan apalagi dibidang sosial yang merupakan pembangunan non pisik yang akan menjadi change atau perubahan pada generasi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan mendatang.

Dari hasil wawancara penelitian bersama bapak Paisal Siregar selaku DPRD Tapanuli Selatan, bahwa beliau mengungkapkan tentang kendala yang dihadapi dalam pengawasan pembangunan sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

[35] Hasil wawancara bersama Bapak Borkat Siregar dan Bapak Sallim Pane. Sebagai kepala desa, Tgl 20 Mei 2021 pkl 11.30

1.kehidupan sosial ekonomi masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan relative belum baik sehingga membelakangkan kepentingan sosial kegamaan.

2. Kurangnya pemimpin agama (pemuka agama) tingkat daerah, yang mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, agar memperioritaskan kepentingan sosial keagamaan,

3. sebagian sarana ibadah yang masih kurang memadai sehingga masyarakat tidak bisa sepenuhnya melakukan kegiatan sosial kegamaan dengan nyaman dan tentram, seperti bangunan masjid di berbagai desa yang masih kecil dan media lainnya belum ada.

4.Masih banyaknya berbagai bentuk tindakan a-moral dari masyarakat yang sulit untuk diubah dan menjadi factor hambatan bagi masyarakatnya.

5. Minimnya lembaga agama yang menangani kegiatan soaial keagamaan secara teratur, apalagi di bidang pendidikan agama bagi anak-anak, dan remaja.

6. Kurangnya Contoh dan pengamalan agama pada masyarakat Tapanuli Selatan sehingga sulit untuk mensosialisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.[36]

F. Solusi yang Dilakukan DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam mengantisipasi berbagai kendala yang muncul, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, mengupayakan solusi untuk meningkatkan pelayanan dalam

[36] Hasill Wawancara Bersama Bapak Arwan Siregar S.Sos Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tgl 12 April 2021 pkl 9.30 Wib

bidang sosial keagamaan di Tapanuli Selatan , berikut komentar bapak Paisal Siregar terkait solusinya, antara lain:

1. Pihak pemerintahan, DPRD selaku badan yang menaungi dan menjadi bagian dari suara rakyat harus bekerja sama dengan masyarakat agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keagamaan karna keduanya sangat berkaitan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik

2. Memberikan peraturan baru dengan mewajibkan setiap daerah atau lingkungan desa agar memiliki tokoh agama guna mengarahkan masyarakat setempat agar memperioritaskan sosial keagamaan.

3. mengeluarkan bantuan kepada masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah dan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas dan semangatmasyarakat untuk lebih mengutamakan sosial keagamaan.

4. membuat perda mengenai perbuatan a-moral dan memberikan sanksi bagi para pelanggar agar jera dan tidak melakukan kekcauan yang dapat meresahkan masyarakat untuk bersosialisasi dalam agama.

5. Menambah serta mengaktifkan organisasi lembaga dakwah di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang membangun dan memajukan pendidikan bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Beberapa solisi diatas merupakan bentuk peduli dari pihak DPRD terhadap masyarakat agar bisa mengaplikasikan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.[37]

[37] Hasil Wawancaa bersama Bapak Paisal Siregar, ST anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tgl 20April 2021 Pkl 10.40

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian yang sudah dilakikan di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan judul skripsi “Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan bidang Sosial Keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan maka penelititi dapat menympulkan sebagai berikut:

1.Adapun Pelaksanaan Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, Mningkatkan kualitas pemahaman, pengajaran serta pengalaman ajaran dalam beragama, yang berkualitas dan merata, meningkatkan dan memanfaatkan kualitas untuk mengelola potensi sosial keagamaan, peningkatan kualitas ibadah dan mempererat persaudaraan diantara masyarakat, meningkatkan akses pendidikan serta menekankan tentang perlunya sosial keagaamaan bagi anak-anak, remaja dewasa dan para orang tua.

2. Pengaruh Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, merubahpola pikir serta konsep paradigma dalam masyarakat untuk berpikir lebih maju. Membangun kebersamaan guna mempererat dan melancarkan segala perencanaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Memberikan contoh terhadap DPRD itu sendiri maupun kepada masyarakat agar bisa menerapkan segala peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah.

3. Hambatan serta solusi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1.kehidupan sosial ekonomi masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan relative belum baik sehingga membelakangkan kepentingan sosial kegamaan.

a. Kurangnya pemimpin agama (pemuka agama) tingkat daerah, yang mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, agar memperioritaskan kepentingan sosial keagamaan,

b. sebagian sarana ibadah yang masih kurang memadai sehingga masyarakat tidak bisa sepenuhnya melakukan kegiatan sosial kegamaan dengan nyaman dan tentram, seperti bangunan masjid di berbagai desa yang masih kecil dan media lainnya belum ada.

c. Masih banyaknya berbagai bentuk tindakan a-moral dari masyarakat yang sulit untuk diubah dan menjadi factor hambatan bagi masyarakatnya.

d. Minimnya lembaga agama yang menangani kegiatan soaial keagamaan secara teratur, apalagi di bidang pendidikan agama bagi anak-anak, dan remaja.

e. Kurangnya Contoh dan pengamalan agama pada masyarakat Tapanuli Selatan sehingga sulit untuk mensosialisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Solusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam hambatan atau permasalahan ini adalah:

a. Pihak pemerintahan, DPRD selaku badan yang menaungi dan menjadi bagian dari suara rakyat harus bekerja sama dengan masyarakat agar bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keagamaan karna keduanya sangat berkaitan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik

b. Memberikan peraturan baru dengan mewajibkan setiap daerah atau lingkungan desa agar memiliki tokoh agama guna mengarahkan masyarakat setempat agar memperioritaskan sosial keagamaan.

c. Mengeluarkan bantuan kepada masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah dan fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas dan semangatmasyarakat untuk lebih mengutamakan sosial keagamaan.

d. Membuat perda mengenai perbuatan a-moral dan memberikan sanksi bagi para pelanggar agar jera dan tidak melakukan kekcauan yang dapat meresahkan masyarakat untuk bersosialisasi dalam agama.

e. Menambah serta mengaktifkan organisasi lembaga dakwah di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang membangun dan memajukan pendidikan bagi anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua.

Beberapa solisi diatas merupakan bentuk peduli dari pihak DPRD terhadap masyarakat agar bisa mengaplikasikan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis memberikan pendapat tentang saran-saran bagi semua pihak yang berpengaruh pada manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penulis berharap saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga DPRD yang bertujuan untuk kemajuan bersama baik bagi masyarakat maupun DPRD itu sendiri. Kepada para pembaca yang tertarik untuk mengetahui seperti apa kondisi perkembangan bidang sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu sebagai berikut:

1.Pengaruh DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan kontrol dalam aktivitas masyarakat agar lebih terarah dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dan tugas untk mencapai tujuan sebuah kesejahteraan.

2. Memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mengaspirasikan pendapat guna memajukan bidang sosial keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Lebih melihat peluang ditengah-tengah masyarakat, baik kalangan anak-anak, remaja yang bisa mengembangkan potensi diri sebagai generasi anak muda yang akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah Tapanuli Selatan

4. Memberikan partisipasi serta motivasi kepada lembaga-lembaga yang ada di daerah Tpanuli Selatan guna memberdayakan serta membimbing masyarakat baik pada bidang pendidikan, ekonomi sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama Angger Roni, 2021 ,*Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi* Malang:: Ae Publishing

Amirullah, 2013 , *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses pengendalian* Jakarta:Mitra Wacana Media

Catio Mukhlis, 2021, Sarwani dan Rukman, Manajemen Strategi Tanggerang: Indigo Media

Catharina Vista Okta Frida Okta Vista Catharina, 2019 *Manajemen Strategi* Garuthawaca

Departemen Agama RI, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu

Departemen Agama R.i, *Eksistensi dan Langkahnya* Jakarta: Departemen Agama

Dewi Asriani dkk, *Manajamen Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Konawa* Tahun 2015-2017 Jurnal

Efri Novianto, 2019, *Manajemen Strategi* Yogyakarta: CV Budi Utama

Fitrah Muh dan Luthfiyah, 2017, *Metodologi Penelitian* Suka Bimi: CV Jejak

Fitrah, Muh dan Luthfiyah 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak

Firmansyah Anwar, dan Tiffani Setyo Pratiwi, *Agama dan Pembangunan Dalam Melihat Keberkaitan Agama Terhadap Proses Pembangunan dan Modernisasi*, JurnalYogyakarta: Uneversitas Teknologi Yogyakarta

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Hasil Wawancaa bersama Ibuk Erlina Hasibuan, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasill Wawancara Bersama Bapak Paisal Siregar ST Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasil Wawancaa bersama Bapak Arwan Siregar, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Hamid Abdullah, 2009, *Ilmu Ahlak* Bandung: Pustaka Cipta,

https://media.neliti.com/media/publications/121929-ID-analisis-terhadap-kebijakan-kebijakan-pe.pdf di akses pada tgl 29 January 2021 pkl 09.25

Meleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Makmur Ahdi, 2016 *Ulama dan Pembangunan Sosial* , Yogyakarta: Aswaja

Pressindo,

Nabila Dzatin Amira, 2019, *Konstruksi Participatory Berbasis Budaya Kalosara Sebuah Perspektif Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019

Nasution, Wahyuddin Nur, 2019 *Strategi Pembelajaran*, Jakarta :Perdana Publishing,

Perda Tapsel no 7 thn 2016

Poernomo Freddy, 2020 *Hukum Pemerintahan Daerah, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* Surabaya: Airlangga University Press

Pedoman Wawancara

Manajemen Strategi DPRD Dalam Pengawasan Pembangunan Bidang Sosial Keagamaan Muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan:

1.Bagaimana pelaksanaan manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial kegamaan masyarakat muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. sejauh mana pengawasan pembangunan ini diterapkan.

3. Pengaruh Manajemen strategi DPRD dalam pengawasan pembangunan bidang sosial keagamaan muslim di Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Kegiatan sosial keagamaan apa saja yang diikuti oleh DPRD dengan masyarakat.

5. Apakah program pengawasan pembangunan ini memperoleh perubahan pada masyarakat.

6. Apa factor kegagalan hambatan DPRD dalam pengawasan pembangunan ini.

7. Apa Faktor keberhasilan (solusi) yang di lakukan oleh DPRD dalam pengawasan pembangunan sosial kegamaan ini.

Lampiran Dokumentasi

Foto Bersama anggota Bapak Paisal Siregar ST. sebagai anggota DPRD dan ketua Partai Praksi Hanura Kabupaten Tapanuli Selatan

Foto bersama Bapak Arwan Siregar dan Ibuk Erlina Hasibuan sebagai kepala bagian Administrasi Kesekretariatan Program Keuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Foto bersama bapak Paisal Siregar dan Pak Arwan Siregar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1.Nama	: Isro Siregar
2. Nim	: 0104173149
3. Jurusan	: Manajemen Dakwah
4. Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
5. Universitas	: Islam Negri Sumatera Utara
6. Tempat/ Tgl lahir	: Barnang Koling, 17 September 1999
7. Anak ke-	: 1 dari 4
8. Alamat	: Desa Barnang Koling kec. Siporok
9. Nama Orang Tua	:
a. Ayah	: Borkat Siregar
b. Ibu	: Irma Harahap
10. Alamat Orang tua	: Desa Barnang Koling Kecamatan Sipirok
Pendidikan	:

1. SDN Barnang Koling
2. MTS.S Jabalul Madaniyah Sijungkang
3. MAS Jabalul Madaniyah Sijungkang
4. Universitas Islam Negri Sumatera Utara Fak. Dakwah dan Komunikasi Jurusan. Manajemen Dakwah

Motto : Bantulah orang lain maka Alah lah yang akan menolongmu dan Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini jangan menunda untuk besok.